

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahun Indonesia belum mampu mengangkat seluruh rakyat dari kemiskinan. Sebelum pandemi *covid-19* melanda, jumlah orang miskin di Indonesia berhasil ditekan pada kisaran 9% dari total penduduk. Bila penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa maka prosentase itu menggambarkan sekitar 25 jutaan penduduk mengalami kemiskinan. Secara faktual kita dapat mengamati di berbagai tempat bahwa masih banyak warga masyarakat yang masih berkekurangan secara finansial dan belum bekerja. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan layak di dalam negeri karena rendahnya jumlah daya tampung lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh sebab itu, mereka mencari jalan keluar untuk bekerja di luar negeri yang memberikan gaji/upah lebih tinggi. Mereka biasanya bekerja di Arab Saudi, Hongkong, Jepang, Malaysia dan Singapura. Pekerja Migran melalui BP2MI adalah salah satu cara untuk mendapat pekerjaan untuk mengurangi kemiskinan bagi masyarakat yang tidak berpendidikan tinggi. Kondisi sosial, pendidikan, budaya dan ekonomi masih mendominasi karakteristik pekerja migran Indonesia, sehingga mempengaruhi pekerjaan di negara tujuan yang mereka tempati, yakni pekerjaan non formal dan sektor domestik. Banyaknya faktor yang terjadi menjadi penyebab masalah pekerja migran yang di negara tujuan, selain disebabkan karena sistem industri pekerja migran yang diterapkan di sana, terdapat juga kebijakan perlindungan hukum, dan kualitas subjektif pada pekerja migran (Tutik Sulistyowati, 2019:2). Secara demikian, Indonesia memiliki pengalaman yang cukup lama dalam pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI). Tidak jarang, dalam pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ini ditandai dengan banyaknya kasus yang terjadi di lapangan yang membuat PMI menderita, salah satunya PMI yang dipekerjakan gajinya tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya oleh majikannya.

Pasca kedatangan PMI kembali ke Indonesia akan menyebabkan tingginya pengangguran jika PMI tersebut tidak menyiapkan tabungan, skill dan usahanya. PMI yang bekerja di luar negeri belum mampu memanfaatkan hasil kerja keras mereka selama ini untuk usaha-usaha yang bersifat produktif, tetapi lebih berperilaku konsumtif, hal ini mendorong mereka untuk kembali bekerja ke luar negeri. Kesulitan ini diteruskan dan menjadi lebih sulit jika PMI Purna tidak bisa menemukan pekerjaan. Secara tidak langsung mereka tidak berhasil mengatur keuangan dengan baik. Sementara keluarga yang ditinggalkan hanya bisa berharap gaji PMI (remittance) tanpa mengupayakan bagaimana cara memanfaatkan uang tersebut untuk dapat mengembangkan usaha-usaha produktif. Selanjutnya anak-anak dari PMI sendiri tidak mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang baik. Untuk itu pemerintah melalui BP2MI perlu membuat program yang bersifat koordinatif dan terintegrasi untuk menjawab semua permasalahan tersebut. Hal ini perlu dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah setempat untuk melakukan program pemberdayaan pasca kepulangan PMI Purna tersebut.

Oleh karena masalahnya yakni PMI Purna tidak selalu menjadi tenaga kerja produktif. Kondisi semacam itu menimbulkan keprihatinan bagi banyak pihak, termasuk Badan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP2MI merupakan salah satu Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani langsung program pemerintah di atas. BP2MI juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Program Pemberdayaan PMI Purna. Dalam melaksanakan serta menjalankan tugas tersebut, BP2MI memberi pelayanan dan pemberdayaan terhadap para tenaga kerja, termasuk PMI Purna. Secara demikian, BP2MI bertugas untuk melatih PMI Purna agar menjadi wirausahawan baru sehingga tak perlu lagi kembali bekerja di luar negeri.

Pemberdayaan PMI merupakan usaha memberdayakan sumber daya yang telah ada untuk meningkatkan pendapatan PMI, sehingga tidak lagi mengambil keputusan melakukan migrasi. Pemberdayaan PMI ini harus disesuaikan dengan faktor sosial, budaya dan ekonomi serta potensi sumber daya domestik yang berpotensi dalam membangun usaha. Oleh sebab itu pemberdayaan bagi mereka perlu untuk dilakukan. Pemberdayaan merupakan serangkaian upaya tindakan secara umum agar dapat meningkatkan keterampilan, memperluas jaringan dan

berperan penting dalam menentukan jalan hidup sendiri melalui penciptaan kesempatan agar mampu berpartisipasi secara aktif (G. Sumodiningrat, 1997:73). Pemberdayaan PMI Purna ini harus dikondisikan secara sosial, budaya dan ekonomi dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dapat mendukung pengembangan usaha produktif.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna, dan Keluarganya menyatakan bahwa Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia adalah suatu proses, cara serta upaya dalam membangun pengetahuan dan meningkatkan keterampilan yang ditujukan untuk Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna dan Keluarganya agar dapat berusaha secara mandiri, menjadi tenaga kerja yang unggul, berkompeten serta berkualitas. Bila hasil pemberdayaan ini tercapai maka diharapkan PMI Purna tidak mempunyai pemikiran lagi untuk bekerja di tempat kerja luar negeri kembali.

Selain tinjauan yuridis dan faktual di atas, secara akademis topik ini telah diteliti oleh sejumlah peneliti. Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa hasil penelitian yang berhasil penulis temukan, beberapa hasil penelitian tersebut berfokus pada model pemberdayaan (Kholifatul, 2019), elemen komunikasi (Asri, 2021), model komunikasi pembangunan (Dayanti, 2018), implementasi program (Salvino, 2019), model kewirausahaan (Nenet dan Gusti, 2014), fungsi balai (Saraswati, 2019), Analisis Komunikasi Assyifa, 2019), dan pemberdayaan mantan buruh migran perempuan (Arifiartianingsih, 2016). Oleh karena itu, dari delapan tinjauan pustaka ini hanya ada satu penelitian yang berfokus pada pemberdayaan, yaitu pemberdayaan mantan buruh migran perempuan (Arifiartianingsih, 2016). Beranjak dari hal ini, penulis memandang penting untuk mengkaji pemberdayaan terhadap PMI Purna untuk melengkapi hasil kajian tersebut. Namun agak berbeda dari penelitian Arifiartianingsih (2016), topik pemberdayaan yang penulis pilih mengambil subyek tentang PMI Purna, baik laki-laki maupun perempuan; bukan hanya perempuan. Dengan demikian, penelitian ini akan melanjutkan hasil kajian tersebut dengan berfokus pada PMI

Purna, bukan buruh migran, dan keseluruhan PMI Purna laki-laki dan perempuan, bukan hanya perempuan seperti penelitian Arifiartiningsih (2016) tersebut.

Selain pertimbangan akademis di atas, penulis memilih topik ini juga didasarkan pada pertimbangan praktis. Alasan praktis peneliti adalah karena peneliti pernah melakukan *internship* di UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Unit Pelaksana Daerah Yogyakarta pada 20 September 2021 sampai 12 November 2021, sehingga peneliti telah memiliki pemahaman awal, data dan relasi yang diharapkan dapat memudahkan proses penelitian ini. Selain itu, pada waktu melaksanakan *internship* selama 3 bulan di sana, peneliti memang sudah tertarik pada topik pemberdayaan PMI Purna yang dikerjakan oleh BP2MI.

Berkaitan dengan pilihan lokasi penelitian, peneliti juga telah memperoleh laporan di kantor UPT BP2MI Yogyakarta tentang informasi keberadaan PMI Purna dan keluarganya di Desa Wisata Garongan Wonokerto. Seperti kita ketahui, jumlah kedatangan tenaga kerja yang telah kembali begitu banyak. Untuk itu pemerintah perlu membuat program yang bersifat multiguna, terarah dan konsisten untuk menjawab semua permasalahan tersebut. Fenomena PMI itu ada di berbagai tempat, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu kabupaten di DIY yang banyak mengirimkan PMI adalah Sleman. Selama beberapa tahun Kabupaten Sleman termasuk pengirim tenaga kerja ke luar negeri yang cukup besar.

Penulis tertarik meneliti proses pemberdayaan oleh BP2MI DIY pada PMI Purna di desa Garongan alasannya dari pemilihan desa Garongan ini karena melihat keterbatasan situasi dan kondisi pada tahun 2021 masih pandemi Covid-19 jadi pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan BP2MI DIY hanya terjadi di Desa Wisata Garongan, Wonokerto saja sehingga penulis menjadikan target sasaran pemberdayaan BP2MI DIY di desa tersebut. Oleh karena itulah, peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena telah memiliki informasi awal.

Terhadap upaya yang dilakukan oleh BP2MI DIY tersebut penulis dengan sadar ingin mengetahui bagaimana proses pemberdayaan terhadap PMI Purna di Desa Wisata Garongan Wonokerto berlangsung, faktor pendukung dan

penghambat seperti apa yang muncul, serta cara mengatasi hambatan tersebut. Hal-hal itulah yang ingin penulis dalami melalui penelitian ini.

Dengan alasan itulah penulis ingin melakukan penelitian tentang proses pemberdayaan BP2MI terhadap PMI Purna di Desa Wisata Garongan Wonokerto Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Proses Pemberdayaan BP2MI DIY Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Di Desa Wisata Garongan Wonokerto Sleman Yogyakarta”. Apa yang hendak diteliti di dalam judul itu akan peneliti sampaikan pada rumusan masalah berikut ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberdayaan BP2MI DIY terhadap PMI Purna di Desa Wisata Garongan Wonokerto?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang muncul selama pemberdayaan PMI Purna di Desa Wisata Garongan Wonokerto?
3. Bagaimanakah BP2MI DIY mengatasi hambatan tersebut selama melakukan pemberdayaan terhadap PMI Purna di Desa Wisata Garongan Wonokerto?

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini akan penulis awali dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk menemukan konsep-konsep relevan dengan topik dan rumusan masalah di atas. Setelah itu, penelusuran juga akan penulis lakukan dengan menyampaikan aneka konsep terkait yang ditemukan dari aneka literatur teoritik. Dengan demikian kerangka konseptual ini akan disusun berdasarkan review aneka penelitian sebelumnya dan literatur terkait. Penulis akan awali dengan penelusuran terhadap penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan tema ini.

1. Penelurusan Penelitian Relevan

Tema mengenai pemberdayaan pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna bukanlah suatu bahasan baru. Terdapat beberapa penelitian mengenai pemberdayaan PMI Purna dengan perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan akan suatu tinjauan pustaka atau rujukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dan pembahasan dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk mempertegas perbedaan tema dan masalah yang dibahas, serta menghindari terjadinya plagiarisme dari beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya.

Pertama, penelitian Munawaroh Kholifatul (2019), berjudul Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Peran Pekerja Migran Indonesia (PMI Purna) dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur. Persamaan penelitian ini dengan proposal penelitian penulis adalah mengenai subyek yang diberdayakan (PMI Purna), dan subyek yang memberdayakan (BP2MI). Perbedaan penelitian tersebut dengan proposal penelitian penulis adalah mengenai lokasi PMI Purna berada. Penelitian itu meneliti PMI Purna di Kabupaten Lampung Timur sedangkan penelitian penulis hendak meneliti PMI Purna di Desa Wisata Gorongan Wonokerto, Kabupaten Sleman. Dalam pemahaman penulis, perbedaan lokasi akan menyebabkan perbedaan subyek yang diteliti, yang bisa saja hal itu akan menghasilkan data yang berbeda sehingga temuan penelitian menjadi tidak sama. Peneliti berharap dapat menghasilkan temuan berbeda dari penelitian di Lampung Timur tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya program pemberdayaan ini melingkupi pemberdayaan PMI Emas oleh BP2MI dan program Desa Migran Produktif kedua program ini berjalan dengan baik namun pelaksanaannya di Kabupaten Lampung Timur ternyata belum berjalan lancar karena masih ada beberapa hambatan, yakni kurangnya ilmu pengetahuan dan modal, penjualan produk usaha belum stabil dan masih kurangnya akses kemitraan untuk bekerjasama dalam proses pemberdayaan, sehingga masih perlu dioptimalkan.

Kedua, penelitian Savira Dwi Putri Asri (2021), berjudul Analisis Elemen Komunikasi Pemberdayaan Pada Program BP2MI Jawa Tengah Terhadap PMI

Purna di Desa Sempon, Kabupaten Temanggung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis rancang adalah mengenai program pemberdayaan yang memberikan edukasi kepada PMI Purna. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada lokasi di mana PMI Purna itu berada. Penelitian itu meneliti PMI Purna di Desa Sempon, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sedangkan penelitian penulis hendak meneliti PMI Purna di Desa Wonokerto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pemahaman penulis, perbedaan lokasi akan membawa akibat pada perbedaan subyek yang diteliti, yang bisa saja hal tersebut akan berdampak pada data yang akan didapatkan juga berbeda sehingga temuan penelitiannya pun bisa jadi tidak sama.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya program pemberdayaan BP2MI Jawa tengah terhadap PMI Purna yang dilakukan setiap tahunnya untuk memberikan motivasi terhadap PMI Purna yang sudah kembali ke Indonesia. Program ini dilakukan dengan harapan mendapatkan dampak yang bermanfaat bagi sektor pembangunan daerah.

Ketiga, penelitian Rahma Ayu Dayanti (2018), berjudul Model Komunikasi Pembangunan Program BP2MI Lampung Dalam Memberdayakan PMI Purna di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis rancang adalah mengenai permasalahan perekonomian yang dihadapi oleh PMI Purna. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada lokasi di mana PMI Purna itu berada. Penelitian itu meneliti PMI Purna di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur sedangkan penelitian penulis hendak meneliti PMI Purna di Desa Wonokerto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pemahaman penulis, perbedaan lokasi akan membawa akibat pada perbedaan subyek yang diteliti, yang bisa saja hal tersebut akan berdampak pada data yang akan didapatkan juga berbeda sehingga temuan penelitiannya pun bisa jadi tidak sama.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya program pembangunan dan pemberdayaan PMI Purna. Secara keseluruhan program pemberdayaan ini masih perlu dioptimalkan kembali dikarenakan situasi

perekonomian mereka yang hidup di desa pedalaman menjadi hambatan bagi PMI Purna.

Keempat, penelitian Lay Dirgantara Yuan Salvino (2019), berjudul Implementasi Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna PMI Purna di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis rancang adalah mengenai hubungan pemberdayaan masyarakat terhadap PMI Purna didasarkan pada subyek yang diberdayakan, yaitu PMI Purna, dan subyek yang memberdayakan adalah BP2MI. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada lokasi di mana PMI Purna itu berada. Penelitian itu meneliti PMI Purna di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan penelitian penulis hendak meneliti PMI Purna di Desa Wonokerto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pemahaman penulis, perbedaan lokasi akan membawa akibat pada perbedaan subyek yang diteliti, yang bisa saja hal tersebut akan berdampak pada data yang akan didapatkan juga berbeda sehingga temuan penelitiannya pun bisa jadi tidak sama.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya proses hasil dari implementasi atas kebijakan yang telah dilakukan oleh BP2MI Kota Kupang terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Program pemberdayaan ini melingkupi pemberdayaan untuk PMI Purna oleh BP2MI Kupang. Program ini terstruktur dengan baik namun pelaksanaan program ini di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata belum berjalan lancar karena masih ada beberapa hambatan, yakni kurangnya ilmu pengetahuan yang memadai dan modal yang harus dikeluarkan. Secara keseluruhan program pemberdayaan ini masih perlu dikembangkan kembali.

Kelima, penelitian karya Jaya Natasudian Nenet dan Subrata Made I Gusti (2014), berjudul Model Kewirausahawan Pada Pemberdayaan Buruh Migran (PMI) di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Bagian Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis rancang adalah mengenai hubungan pemberdayaan masyarakat terhadap PMI Purna didasarkan pada subyek yang diberdayakan, yaitu PMI Purna, dan subyek yang memberdayakan adalah BP2MI. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada lokasi PMI Purna itu berada dan hanya meneliti sikap mental

terbuka secara psikologis. Penelitian itu meneliti PMI Purna di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Bagian Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan penelitian penulis hendak meneliti PMI Purna di Desa Wonokerto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bila penelitian itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan psikologis terhadap penanganan kondisi mental kewirausahaan PMI Purna maka berbeda dari itu penelitian yang akan penulis lakukan akan berfokus pada program pemberdayaan bagi PMI Purna dengan menggunakan perspektif sosiologis. Dalam pemahaman penulis, perbedaan lokasi akan membawa akibat pada perbedaan subyek yang diteliti, yang kemudian berdampak pada perbedaan data yang akan didapatkan sehingga temuan penelitian tidak sama.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kondisi mental kewirausahaan dari PMI Purna harus lebih diperhatikan kembali dan program pemberdayaan kewirausahaan yang akan dilakukan oleh PMI Purna harus secara terstruktur agar bisa berkelanjutan.

Keenam, penelitian Seli Saraswati (2019), berjudul Fungsi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) Dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia PMI Purna di Lampung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis rancang adalah mengenai hubungan pemberdayaan masyarakat terhadap PMI Purna didasarkan pada subyek yang diberdayakan, yaitu PMI Purna, dan subyek yang memberdayakan adalah BP2MI. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada lokasi di mana PMI Purna itu berada. Penelitian itu meneliti PMI Purna di Lampung sedangkan penelitian penulis hendak meneliti PMI Purna di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pemahaman penulis, perbedaan lokasi akan membawa akibat pada perbedaan subyek yang diteliti, yang bisa saja hal tersebut akan berdampak pada data yang akan didapatkan juga berbeda sehingga temuan penelitiannya pun bisa jadi tidak sama.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya PMI Purna yang memiliki sikap tidak hemat dan belum mempunyai ilmu pengetahuan yang matang dalam mengelola penghasilan yang mereka peroleh selama bekerja di luar negeri. Secara keseluruhan Fungsi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) ini masih perlu dioptimalkan agar PMI Purna dapat memahami dan mampu mengolah hasil keuangan yang diperoleh dari PMI Purna waktu mereka masih bekerja.

Ketujuh, penelitian Kusuma Ratu Assyifa (2019), berjudul Analisis Komunikasi Pemberdayaan Pada Kegiatan Desa PRIMA, Politik, dan Perlindungan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis rancang adalah mengenai hubungan pemberdayaan masyarakat terhadap PMI Purna didasarkan pada subyek yang diberdayakan, yaitu PMI Purna, dan subyek yang memberdayakan adalah BP2MI dan lokasinya yaitu berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah mengambil subjek penelitian pada satu gender saja yaitu perempuan dan kurang adanya pembahasan secara spesifik mengenai faktor pendukung dan penghambat yang terjadi sedangkan penelitian sekarang mengambil subjek penelitian pada dua gender sekaligus yakni laki-laki dan perempuan serta adanya pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat secara spesifik selama proses kegiatan berlangsung.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya proses penerapan komunikasi pemberdayaan haruslah efektif dalam segi pelayanan pada program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh BP2MI karena penerapan komunikasi itu sangat penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Kedelapan, penelitian karya Arifiartianingsih (2016), berjudul pemberdayaan mantan buruh migran perempuan (BMP) di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis rancang adalah mengenai hubungan pemberdayaan masyarakat terhadap PMI Purna didasarkan pada subyek yang diberdayakan, yaitu PMI Purna, dan subyek yang memberdayakan adalah BP2MI. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pertama terletak pada gender yang menjelaskan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna yang berjenis kelamin perempuan saja sedangkan penelitian yang sekarang menjelaskan secara keseluruhan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan kedua, lokasi di mana PMI Purna itu berada. Penelitian itu meneliti PMI Purna di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo sedangkan penelitian

penulis hendak meneliti PMI Purna di Kabupaten Sleman, dalam hal ini adalah Desa Wisata Gorongan Wonokerto. Dalam pemahaman penulis, perbedaan lokasi akan membawa akibat pada perbedaan subyek yang diteliti, yang bisa saja hal itu akan membawa akibat pada data terkumpul juga berbeda sehingga temuan penelitian pun bisa jadi tidak sama.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya bentuk pemberdayaan yang diperoleh Pekerja Migran Indonesia Purna yang berjenis kelamin perempuan yang akan diarahkan dengan setiap munculnya suatu group, organisasi, komunitas atau bisa juga dari lembaga pemerintahan.

Dari hasil tinjauan pustaka di atas penulis memperoleh gambaran bahwa pemberdayaan menjadi salah satu bagian yang penting dan sangat dibutuhkan oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna. Pemberdayaan menjadi gerakan sekaligus jalan kesadaran untuk mereka kembali aktif dalam berkarya secara mandiri maupun berkelompok. Kegiatan pemberdayaan PMI Purna ini merupakan bagian dari proses mereka membangun serta mendorong rasa kepercayaan diri mereka yang kuat dalam mengambil sebuah keputusan untuk memulai suatu usaha. Dengan demikian, keberadaan BP2MI memberikan “batu loncatan” bagi PMI Purna untuk dapat mengembangkan keahliannya dalam upaya menciptakan kehidupan lebih baik.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu terdiri dari metode wawancara mendalam, metode observasi partisipasi, dan metode dokumentasi. Langkah-langkah analisis data yang digunakan antara lain reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Tabel 1.1.
Tinjauan Penelitian Relevan

Penulis	Judul Penelitian	Metode	Ringkasan Penelitian
Munawaroh Kholifatul (2019)	Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Peran Pekerja Migran Indonesia (PMI Purna) dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur	Kualitatif	Program pemberdayaan PMI Purna, yaitu Program (1) Desa Migran Produktif oleh Kementerian Ketenagakerjaan, (2) Program pemberdayaan untuk PMI Emas oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Intinya diperlukan sinergi penuh dalam membangun dan menerapkan model pemberdayaan, serta menjadi model referensi bagi pemberdayaan daerah dengan mendukung PMI untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur.
Savira Dwi Putri Asri (2021)	Analisis Elemen Komunikasi Pemberdayaan Pada Program BP2MI Jawa Tengah Terhadap	Kualitatif	Program pemberdayaan BP2MI Jawa tengah terhadap PMI Purna yang dilakukan setiap tahunnya untuk

	PMI Purna di Desa Sempon, Kabupaten Temanggung		memberikan motivasi terhadap PMI Purna yang sudah kembali ke Indonesia. Program ini dilakukan dengan harapan mendapatkan dampak yang bermanfaat bagi sektor pembangunan daerah.
Rahma Ayu Dayanti (2018)	Model Komunikasi Pembangunan Program BP2MI Lampung Dalam Memberdayakan PMI Purna di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur	Kualitatif	Keadaan dan hambatan yang dihadapi PMI Purna serta model komunikasi pembangunan yang digunakan antara BP2MI Lampung dan PMI Purna dalam program pemberdayaan PMI Purna di Desa Taman Endah.
Lay Dirgantara Yuan Salvino (2019)	Implementasi Program Pemberdayaan PMI Purna di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kualitatif	Proses keseluruhan dari hasil implementasi kebijakan yang telah dijalankan oleh BP2MI Kota Kupang terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan dengan menggunakan 4 alat ukur yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
Jaya Natasudian Nenet dan	Model Kewirausahaan Pada	Kualitatif	Kondisi mental kewirausahaan dari para

Subrata Made I Gusti (2014)	Pemberdayaan Buruh Migran (PMI) di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Bagian Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat		buruh migran dan pola pemberdayaan kewirausahaan yang dapat dipelajari dan digunakan oleh para buruh migran tersebut.
Seli Saraswati (2019)	Fungsi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) Dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia PMI Purna di Lampung	Kualitatif	Kegiatan BP2MI Lampung dalam memberikan pengetahuan dan dorongan terhadap PMI Purna yang berhubungan dengan sistem pengembangan ekonomi kreatif dalam mengatur gaji yang mereka terima selama bekerja di luar negeri.
Kusuma Ratu Assyifa (2019)	Analisis Komunikasi Pemberdayaan Pada Kegiatan Desa PRIMA, Politik, dan Perlindungan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY	Kualitatif	Penerapan komunikasi pemberdayaan pada program pemberdayaan perempuan dan masyarakat DIY yang membutuhkan selama kegiatan berlangsung.
Arifiartianingsih (2016)	Pemberdayaan mantan buruh migran perempuan (BMP) di	Kualitatif	Memberi wawasan dalam bentuk pemberdayaan yang diperoleh mantan

	Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo		BMP melalui komunitas ataupun dari pemerintahan setempat.
--	--	--	--

Sumber:

Rangkuman

penulis,

2022.



Berdasarkan pemaparan perbedaan dan persamaan yang sudah penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu, penulis tegaskan bahwa isi dalam penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. Dimulai dari segi lokasi, lokasi penelitian yang penulis gunakan adalah ruang lingkup domisili penulis. Fokus penelitian ini ada pada Bagaimana Proses Pemberdayaan BP2MI DIY Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Di Desa Wisata Garongan, Wonokerto, Sleman, Yogyakarta.

Selain itu, aneka proses pemaparan perbedaan dan persamaan yang penulis uraikan di atas memiliki sebuah manfaat dalam penyusunan laporan penelitian ini. Manfaat tersebut adalah untuk membantu penulis bagaimana pengaplikasian konsep dan unsur konsep dalam sebuah penelitian. Dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki konsep yang sama dengan penelitian milik Arifiartianingsih (2006). Kesamaan konsep tersebut adalah pemberdayaan. Namun agak berbeda dari penelitian Arifiartiningsih (2016), topik pemberdayaan yang penulis pilih mengambil subyek tentang PMI Purna, baik laki-laki maupun perempuan; bukan hanya perempuan. Dengan demikian, penelitian ini akan melanjutkan hasil kajian tersebut dengan berfokus pada PMI Purna, bukan buruh migran, dan keseluruhan PMI Purna laki-laki dan perempuan, bukan hanya perempuan seperti penelitian Arifiartiningsih (2016) tersebut. Walaupun dengan kesamaan konsep tersebut, penulis menegaskan bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penulis akan mengkaitkan dengan konsep lain yaitu konsep proses pemberdayaan.

2. Penelusuran Pustaka Teoritik

Berkaitan dengan tema penelitian ini, konsep yang relevan adalah proses pemberdayaan dan PMI Purna. Hal inilah yang secara teoritik akan coba penulis dalam rangka membentuk kerangka berpikir penulis sebelum dan selama melakukan penelitian lapangan. Pada Bab III nanti, konsep-konsep teoritik ini akan didialogkan dengan hasil temuan lapangan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah.

1) Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun berkelompok. Proses ini adalah bentuk dari perubahan sosial yang mempunyai keterkaitan antara lapisan sosial yang diserahkan dengan adanya penentangan ekonomi, muncullah kemampuan individu yang “memiliki nasib yang sama” untuk saling bertemu dalam suatu kelompok yang mengarah sebagai bentuk pemberdayaan paling efektif (Friedmann, 1993). Dengan demikian, pencapaian dapat melalui proses komunikasi bersama dalam setiap kelompok, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk menggambarkan suatu situasi, mengeluarkan pendapat untuk menentukan masalah kemudian mencari solusinya. Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan setiap individu menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menciptakan rasa tanggung jawab sendiri (Wibowo, 2007:137).

Bagaimanakah proses pemberdayaan itu dilakukan dan ditujukan kepada siapa? Pemberdayaan dilakukan secara menyeluruh, konsisten serta kontinyu untuk menjaga keseimbangan relasional di antara para pihak yang terlibat (I Nyoman Sumaryadi, 2005:145). Hal tersebut didapat melalui jalan diskusi dari pembicaraan setiap individu dalam kelompok pemberdayaan untuk menggambarkan serta menjelaskan situasi dan kondisi yang melingkupi, menyampaikan pendapat dan perasaan dalam memahami masalah, serta mengkaji solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bila subyek sasaran dapat melakukan proses itu dengan tepat dan mandiri sehingga masalah yang dihadapi dapat diatasi maka pemberdayaan yang dilakukan berarti telah berhasil. Keberdayaan telah dimiliki oleh subyek sasaran. Menurut Tantan Hermansah (2016:47-48), terdapat empat proses wajib yang harus dilalui dalam proses pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan. Tahap perencanaan ini penulis kaitkan dengan PMI Purna di lokasi penelitian maka tahap ini berisi keikutsertaan anggota dalam diskusi bersama untuk merencanakan program.

2. Tahap Pelaksanaan. Dalam tahap ini anggota ikut serta dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Tahap Pasca Pelatihan. Tahap ini mengupayakan manfaat dari keikutsertaan anggota dalam mengikuti program.

4. Tahap Monitoring dan Evaluasi. Sesuai mengikuti tahap ini, perlu adanya pengawasan dalam melaksanakan program, agar program mempunyai sistem kinerja yang baik secara manajerial maupun substantif.

Pada penelitian ini, pengertian proses pemberdayaan yang penulis pakai adalah dari Tantan Hermansah (2016) karena pemberdayaan ditujukan secara langsung terhadap setiap individu yang menjadi target sasaran. Proses ini merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang berhubungan dengan usaha untuk saling mendalami agar pemberdayaan dapat berjalan dengan baik.

2.) Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Berkaitan dengan proses di dalam pemberdayaan itu terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, beberapa pendapat ahli bisa penulis telusuri, adalah Notoatmodjo (2003) dan Sutaryono (2015). Menurut Notoatmodjo (2003) bahwa faktor pendukung yaitu faktor yang memfasilitasi setiap individu atau kelompok termasuk keterampilan. Faktor pendukung juga bisa digunakan sebagai motivasi agar selalu konsisten dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Faktor pendukung dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam. Jadi, artinya sesuatu yang muncul dari kesadaran diri sendiri. Contoh dari faktor internal misalnya sadar akan pentingnya menerapkan edukasi yang sudah didapatkan.

b) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Jadi, artinya sesuatu yang mempengaruhi seseorang dari luar. Faktor eksternal memiliki peran untuk memberikan motivasi pada saat faktor internal mulai memudar. Contoh dari faktor

eksternal ini seperti pengaruh keluarga, teman dan lingkungan dalam memberikan *support*.

Menurut Sutaryono (2015) bahwa faktor penghambat adalah faktor yang menandai serta menghentikan segala sesuatu yang akan menjadi berlebihan dari sebelumnya. Faktor penghambat bisa mempengaruhi seseorang dalam menerapkan sesuatu, misalnya dari diri sendiri ada pengaruh seperti pemalas, tidak taat sehingga mudah terbawa arus serta kurang adanya dukungan dari faktor keluarga, kerabat dan lingkungan yang memberikan dampak yang tidak baik.

Menurut Sutaryono (2015: 22) faktor penghambat dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal.

a) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari setiap masing-masing individu. Faktor internal muncul karena pengaruh dari setiap individu untuk tidak mengerjakan sesuatu, misalnya tidak taat dan malas yang muncul dari tiap individu untuk menjalankan ketaatan. Dengan begitu faktor ini yang akan menghambat individu tersebut melakukan hal yang ditimbulkan oleh diri sendiri.

b) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masing-masing individu. Faktor eksternal muncul karena sesuatu yang disebabkan dari luar, sehingga mempengaruhi setiap orang untuk tidak menjalankan kegiatan apapun, misalnya pengaruh dari keluarga, teman dan lingkungan yang tidak mendukung untuk mengerjakan sesuatu. Saat ada yang ingin melakukan suatu kebaikan namun ada sesuatu yang kurang didukung dari pihak luar sehingga menyebabkan sesuatu yang kurang berkenan.

Berkaitan dengan proses di dalam pemberdayaan selanjutnya, ada beberapa pendapat ahli bisa penulis telusuri, adalah Tantan Hermansah (2016) dan Adi (2013). Menurut Tantan Hermansah (2016:47-48), terdapat empat proses wajib yang harus dilalui dalam proses pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

5. Tahap Perencanaan. Tahap perencanaan ini penulis kaitkan dengan PMI Purna di lokasi penelitian maka tahap ini berisi keikutsertaan anggota dalam diskusi bersama untuk merencanakan program.

6. Tahap Pelaksanaan. Dalam tahap ini anggota ikut serta dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya.

7. Tahap Pasca Pelatihan. Tahap ini mengupayakan manfaat dari keikutsertaan anggota dalam mengikuti program.

8. Tahap Monitoring dan Evaluasi. Sesuai mengikuti tahap ini, perlu adanya pengawasan dalam melaksanakan program, agar program mempunyai sistem kinerja yang baik secara manajerial maupun substantif.

Menurut Adi (2013) tahapan dalam proses pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap persiapan. Dalam tahap persiapan kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua, yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas diperlukan untuk menyelaraskan tanggapan antar anggota sebagai aktor pemberdaya tentang apa yang akan di proses dalam menyiapkan program. Sedangkan persiapan lapangan dilakukan melalui proses perizinan yang sudah dijadikan daerah sasaran.

2. Tahap pengkajian. Proses yang dilakukan dengan menyelesaikan masalah atau kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki.

3. Tahap perencanaan. Tahap ini direncanakan secara partisipatif mengajak anggota untuk berpikir tentang masalah yang dihadapi, bagaimana cara mengatasinya.

4. Tahap formulasi rencana aksi. Pada tahap ini mengupayakan untuk membantu masing-masing kelompok dalam menentukan program.

5. Tahap implementasi. Tahap pelaksanaan ini harus didasari dengan adanya kerjasama yang sportif antar anggota.

6. Tahap evaluasi. Tahap ini merupakan proses pengawasan terhadap program yang sedang berjalan.

7. Tahap terminasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari hubungan secara formal.

Pada penelitian ini, proses pemberdayaan yang penulis pakai adalah dari Tantan Hermansah (2016) karena proses pemberdayaan ini fokus pada inti proses pemberdayaannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang penulis butuhkan untuk mengumpulkan data secara akurat.

3.) Cara Mengatasi Hambatan

Berkaitan dengan cara mengatasi hambatan di dalam pemberdayaan itu, beberapa pendapat ahli bisa penulis telusuri, adalah Sumodiningrat (1999) dan Mardikanto, Soebianto (2012). Dalam melaksanakan pemberdayaan, hambatan tentu ditemui.

Terdapat tiga aspek pembelajaran untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pemberdayaan (Sumodiningrat, 1999:133-134), yaitu:

1. *Enabling* merupakan upaya BP2MI DIY dalam mendorong PMI Purna untuk melakukan pengembangan potensi. Setiap individu memiliki potensi yang berguna bagi hidupnya. Tidak ada individu tanpa kemampuan. Kemampuan potensial inilah yang perlu dikembangkan. Selalu ada peluang bagi setiap orang untuk memampukan diri (*enabling*) sehingga dapat berkembang secara lebih baik.
2. *Empowering* merupakan upaya BP2MI DIY melakukan pengasahan potensi yang dipunyai oleh mereka setiap individu melalui sebuah kelompok, dalam hal ini adalah PMI Purna, melalui kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan.
3. *Protecting* merupakan upaya BP2MI DIY untuk melindungi dan menjaga kepentingan setiap individu yakni mereka (PMI Purna) yang tidak mampu.

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:170) cara mengatasi hambatan di dalam pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumberdaya manusia
2. Mengembangkan kelembagaan kelompok
3. Pemupukan modal
4. Pengembangan usaha produktif
5. Penyediaan informasi tepat-guna.

Pada penelitian ini, cara mengatasi hambatan dalam melakukan pemberdayaan yang penulis pakai adalah dari Sumodiningrat (1999) karena penulis melihat lebih terfokus kedepannya dalam upaya PMI Purna berproses.

Berdasarkan paparan di atas, penulis mengambil beberapa konsep yang dapat digunakan untuk menyusun kerangka berpikir sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan 2) Tahap Pelaksanaan 3) Tahap Pasca Pelatihan 4) Tahap Monitoring dan Evaluasi.

4.) Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna

PMI Purna merupakan warga negara Indonesia yang telah datang dari bekerja di luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah datang ke Indonesia kembali setelah selesainya perjanjian kontrak kerja maupun sebab lain. PMI Purna adalah PMI yang telah menyelesaikan kontrak kerja yang ditempuh minimal selama

dua tahun dan tinggal di Indonesia kurang dari satu tahun (Nusron Wahid, 2015. Kompas.com). PMI Purna adalah warga Negara Indonesia yang bekerja di Negara asing dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah sesuai ketentuan masing-masing Negara tujuan yang sudah habis atau sudah menyelesaikan masa kerjanya.

Undang-Undang (UU) mengatur hak dan kewajiban PMI dan PMI Purna. Setiap PMI, termasuk PMI Purna, memiliki hak dan peluang yang sama untuk dapat bekerja dan/atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan memanfaatkan hasil kerja mereka di luar negeri. Selain itu, mereka juga berhak atas penempatan kerja di luar negeri dan pemulangannya ke daerah asal. Dengan demikian, mereka memperoleh pelayanan yang setara: penempatan kerja di luar negeri dan penjemputan setelah kontrak kerja berakhir. Setelah mereka kembali ke Indonesia maka status mereka berubah menjadi PMI Purna. Pertanyaannya, apakah hanya mereka yang melalui/terdaftar BP2MI atau lembaga PMI? Bahwa semua PMI yang bekerja ke luar negeri tetap mendapatkan perlindungan yang sama dari negara. Di karenakan Undang-undang baru mengalami perubahan nama TKI menjadi PMI adalah New Branding. Jadi, diharapkan UU baru ini memberikan kebijakan dalam melindungi PMI mulai dari Desa hingga PMI kembali ke Tanah Air. Namun tetap perlu dilakukan pendaftaran secara resmi di BP2MI, dan Dinas Kabupaten/Kota sehingga jika sesuatu terjadi, akan lebih mudah terdeteksi dan lebih cepat ditangani. Kemudian pertanyaan selanjutnya apakah yang akan PMI Purna lakukan sekembali dari bekerja di luar negeri? Untuk membantu mereka memperoleh pekerjaan baru di negeri sendiri, baik bekerja pada orang lain maupun menciptakan pekerjaan sendiri, pemerintah menyiapkan BP2MI untuk melakukan program pemberdayaan terhadap PMI Purna.

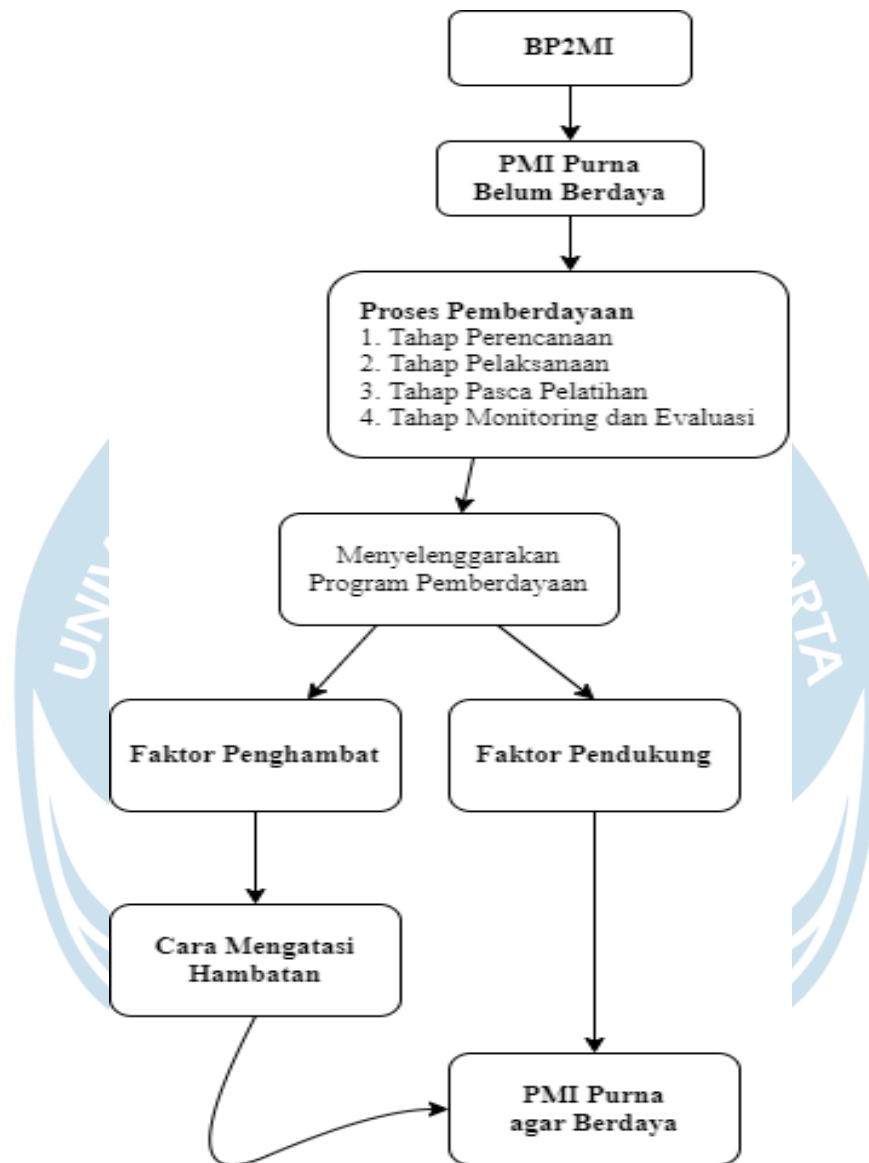
Berdasarkan paparan di atas, penulis akan menggunakan konsep pemberdayaan beserta beberapa unsur yang relevan untuk menyusun kerangka berpikir yang berguna untuk mengarahkan pikiran penulis dalam mengumpulkan data yang relevan guna menjawab rumusan masalah di muka.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan logika berpikir yang akan digunakan di dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses pemberdayaan BP2MI terhadap PMI Purna. Hal tersebut membuat penulis menggunakan tahap perencanaan,

tahap pelaksanaan, tahap pasca pelatihan dan tahap monitoring dan evaluasi untuk menghasilkan PMI Purna yang berkualitas.

Berikut ini alur berpikir yang penulis rencanakan dalam proses penelitian:



Gambar 1.1.

Sumber: Bagan diolah oleh penulis dari kajian teori

Bagan alir di atas menjelaskan bahwa aktor pemberdaya harus mengarahkan serta mengupayakan agar PMI Purna dapat mewujudkan keinginannya dalam membangun usaha/bisnis untuk melanjutkan hidup. Oleh karena itu, aktor pemberdaya (BP2MI DIY) melakukan proses pemberdayaan dengan memanfaatkan faktor pendukung dan mengatasi faktor penghambat untuk melakukan *protecting*, *empowering* dan *enabling* agar PMI Purna berdaya dalam membangun kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat sekembali mereka dari bekerja di luar negeri.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah penulis rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses pemberdayaan BP2MI DIY terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna di Desa Wisata Garongan Wonokerto.
2. Mengetahui berbagai faktor pendukung dan penghambat.
3. Mengetahui cara BP2MI DIY mengatasi hambatan.

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan alur penulisan skripsi yang terdiri dari 4 bab. Tiap bab tersebut berisikan deskripsi bahasan utama, yaitu:

1. BAB 1 – PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian yang membahas mengenai pemberdayaan BP2MI DIY terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) Purna, rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian, kerangka konseptual yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian, dan tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB 2 - METODOLOGI DAN DESKRIPSI SUBJEK PENELITIAN

Bab ini terdiri dari metode penelitian, jenis penelitian, deskripsi informan, operasionalisasi konsep, metode pengumpulan data, jenis data, cara analisis data, dan deskripsi subjek penelitian tentang gambaran umum mengenai BP2MI DIY, serta penjelasan mengenai program pemberdayaan PMI Purna.

3. BAB 3 - TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil temuan dari proses pengumpulan data yang dikaitkan dengan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian.

4. BAB 4 – KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil jawaban pertanyaan penelitian, dan ringkasan berbagai temuan penelitian, serta saran-saran yang dianggap perlu dalam perbaikan dan kemajuan BP2MI DIY.